



Supporting and Constraining Factors in the Implementation of Narcotics Rehabilitation Programs at the Class IIA Muaro Padang Correctional Institution

Lutfiah Chania¹, Zikri Alhadi²

Universitas Negeri Padang

fiahchania2002@gmail.com

ABSTRACT

This study aims to examine various factors influencing the implementation of the Narcotics Rehabilitation Program for Correctional Inmates at the Class IIA Muaro Padang Correctional Institution, including both supporting and inhibiting factors. Rehabilitation programs for narcotics abusers constitute an essential component of the correctional system, as they focus on recovery processes, guidance, and the enhancement of inmates' social capacities to enable them to function productively after completing their sentences. This study employs a qualitative approach using a descriptive method. Data were collected through in-depth interviews with correctional officers and program administrators, direct observation of rehabilitation activities, and document analysis related to program implementation and policy. The findings indicate that program effectiveness is supported by the commitment and active involvement of correctional officers, the existence of internal regulations that promote rehabilitation activities, and coordination with relevant institutions in the implementation of inmate guidance. However, the study also identifies several obstacles, including the limited number of human resources with specialized competencies in narcotics rehabilitation, inadequate facilities and infrastructure, insufficient budgetary support, and limited quotas for inmate participation in the program. In addition, variations in inmates' levels of motivation and awareness further complicate the implementation of rehabilitation activities. Based on these findings, this study emphasizes that the success of narcotics rehabilitation programs is strongly influenced by resource readiness, inter-institutional collaboration, and institutional capacity building to ensure that rehabilitation objectives can be achieved optimally and sustainably.

Keywords: supporting factors, inhibiting factors, narcotics rehabilitation.

PENDAHULUAN

Penyalahgunaan narkotika hingga kini masih menjadi persoalan sosial yang menimbulkan dampak luas dan berlapis, tidak hanya mengancam kesehatan individu, tetapi juga memengaruhi stabilitas sosial, keamanan negara, serta proses pembangunan secara keseluruhan. Di Indonesia, tindak pidana yang berkaitan dengan narkotika masih mendominasi jumlah kasus yang ditangani aparat penegak hukum. Kondisi tersebut berimplikasi langsung pada meningkatnya populasi narapidana kasus narkotika di berbagai lembaga pemasyarakatan. Situasi ini menuntut lembaga pemasyarakatan untuk tidak hanya menjalankan fungsi pemidanaan, tetapi juga menjalankan peran strategis sebagai institusi yang berkontribusi pada upaya rehabilitasi dan pemulihan penyalahguna narkotika melalui program pembinaan yang berkelanjutan (Alfiati, 2025).

Paradigma pemasyarakatan di Indonesia berorientasi pada proses pembinaan yang bertujuan mengembalikan Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) ke masyarakat melalui pendekatan reintegrasi sosial. Dalam konteks narapidana penyalahguna narkoba, pelaksanaan rehabilitasi menjadi bagian integral karena sebagian pelaku sesungguhnya merupakan korban ketergantungan yang membutuhkan intervensi khusus. Program rehabilitasi narkoba dihadirkan untuk memulihkan fungsi fisik, psikis, dan sosial para WBP, sekaligus menekan kemungkinan pengulangan tindak pidana setelah mereka bebas (Damayanti, 2025).

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Muaro Padang menjadi salah satu Unit Pelaksana Teknis pemasyarakatan yang mengimplementasikan Program Rehabilitasi Narkoba bagi WBP. Program ini merupakan perwujudan kebijakan pemerintah dalam penanganan penyalahgunaan narkoba melalui mekanisme rehabilitatif di lingkungan pemasyarakatan. Pelaksanaan program ini diharapkan mampu berkontribusi dalam memutus penyalahgunaan narkoba di kalangan narapidana. Namun, praktik di lapangan menunjukkan bahwa implementasi program tidak selalu berjalan sesuai harapan dan menghadapi berbagai hambatan baik dari segi internal maupun eksternal (Alfiati, 2025).

Berbagai temuan empiris mengindikasikan bahwa pelaksanaan program rehabilitasi narkoba di lembaga pemasyarakatan sering kali terkendala oleh terbatasnya sumber daya, baik sumber daya manusia, anggaran operasional, maupun sarana dan prasarana pendukung. Selain itu, karakteristik WBP yang heterogen, tingkat ketergantungan yang berbeda, serta variasi motivasi dalam mengikuti program turut memengaruhi efektivitas rehabilitasi. Keadaan ini menunjukkan bahwa keberhasilan program rehabilitasi tidak hanya ditentukan oleh kebijakan yang diterapkan, tetapi juga oleh faktor-faktor yang memfasilitasi maupun menghambat pelaksanaannya pada tingkat operasional.

Faktor pendukung pelaksanaan program dapat berasal dari komitmen pimpinan dan petugas pemasyarakatan, ketersediaan regulasi internal, serta adanya kerja sama lintas sektor. Partisipasi aktif WBP juga menjadi elemen penting bagi keberhasilan program karena proses rehabilitasi memerlukan keterlibatan dan kesiapan individu. Damayanti (2025) menekankan bahwa petugas pemasyarakatan memegang peranan kunci sebagai pelaksana utama yang berinteraksi langsung dengan WBP sehingga kualitas pelaksanaan program sangat dipengaruhi oleh kompetensi dan komitmen mereka.

Namun demikian, keberadaan faktor pendukung tidak meniadakan berbagai hambatan yang masih banyak ditemukan. Kekurangan petugas dengan kompetensi profesional dalam bidang rehabilitasi narkoba menjadi salah satu kendala utama. Tingginya beban kerja petugas serta terbatasnya pelatihan teknis juga berpengaruh terhadap kualitas layanan rehabilitasi. Selain itu, keterbatasan anggaran menyebabkan fasilitas pendukung seperti ruang rehabilitasi, bahan ajar, dan fasilitas konseling belum sepenuhnya optimal. Dari sisi WBP, faktor seperti rendahnya motivasi, inkonsistensi mengikuti program, hingga pengaruh lingkungan pergaulan di lapas juga menjadi persoalan serius yang dapat menghambat proses pemulihan (Hidayah, 2026).

Di lingkungan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Muaro Padang, dinamika yang terjadi tidak jauh berbeda. Walaupun program rehabilitasi telah dijalankan secara rutin, efektivitasnya tetap dipengaruhi oleh kondisi sumber daya, kapasitas kelembagaan, serta karakteristik WBP. Kompleksitas tersebut menegaskan perlunya penelitian yang lebih mendalam untuk memahami bagaimana faktor pendukung dan penghambat tersebut bekerja dalam praktik dan bagaimana pengaruhnya terhadap keberhasilan program (Yuska, 2025).

Kajian mengenai faktor pendukung dan penghambat implementasi program rehabilitasi narkoba menjadi penting untuk mengetahui sejauh mana program dilaksanakan secara efektif. Analisis terhadap faktor pendukung dapat membantu lembaga memaksimalkan potensi internal maupun eksternal, sementara identifikasi terhadap faktor penghambat memungkinkan

dirumuskannya strategi perbaikan yang lebih tepat. Tanpa pemahaman tersebut, pelaksanaan program berpotensi berlangsung secara administratif saja tanpa memberikan dampak substantif terhadap pembangunan kapasitas WBP (Yuska, 2025).

Selain memberikan manfaat praktis bagi perbaikan layanan pemasyarakatan, penelitian ini juga memiliki kontribusi teoretis dalam pengembangan kajian implementasi kebijakan. Pelaksanaan kebijakan tidak hanya bergantung pada substansi kebijakan, tetapi juga dipengaruhi oleh kinerja aktor pelaksana, kondisi lingkungan organisasi, serta distribusi sumber daya. Oleh karena itu, mempelajari dinamika program rehabilitasi narkoba di lapas membantu memperkaya pemahaman mengenai bagaimana kebijakan publik bekerja dalam konteks riil.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini difokuskan untuk menganalisis faktor pendukung dan faktor penghambat dalam pelaksanaan Program Rehabilitasi Narkoba di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Muaro Padang. Penelitian ini diharapkan mampu mengidentifikasi elemen-elemen yang memperkuat maupun melemahkan program, serta melihat implikasinya terhadap efektivitas pembinaan WBP penyalahguna narkoba. Dengan demikian, hasil penelitian ini dapat menjadi rujukan bagi pembuat kebijakan maupun praktisi pemasyarakatan dalam meningkatkan kualitas, efektivitas, dan keberlanjutan program rehabilitasi (Hidayah, 2026).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain deskriptif. Pemilihan pendekatan ini bertujuan untuk memperoleh pemahaman mendalam mengenai pelaksanaan Program Rehabilitasi Narkoba, terutama dalam menelaah berbagai faktor yang mendukung maupun menghambat program di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Muaro Padang. Pendekatan deskriptif digunakan karena dapat menggambarkan kondisi aktual di lapangan secara runtut dan apa adanya tanpa memberikan perlakuan tertentu terhadap objek penelitian. Melalui pendekatan ini, peneliti berupaya menangkap realitas implementasi program rehabilitasi narkoba dari sudut pandang para pelaksana dan peserta program secara utuh dan komprehensif (Jainah, 2024).

Pemilihan informan dilakukan menggunakan teknik *purposive sampling*, yaitu menetapkan subjek penelitian berdasarkan kriteria tertentu yang dianggap relevan dengan tujuan penelitian. Informan terdiri atas petugas pemasyarakatan yang terlibat dalam penyusunan dan penerapan program rehabilitasi narkoba, koordinator atau pengelola program rehabilitasi, serta Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) yang mengikuti kegiatan rehabilitasi. Pemilihan subjek ini dimaksudkan agar peneliti dapat mengumpulkan data dari berbagai perspektif, sehingga pemetaan faktor pendukung maupun penghambat program dapat dilakukan secara lebih mendalam dan seimbang.

Teknik pengumpulan data melibatkan wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumentasi. Wawancara mendalam digunakan untuk menggali makna, pengalaman, dan persepsi informan terkait pelaksanaan program maupun hambatan yang mereka temui. Observasi dilakukan untuk melihat langsung aktivitas rehabilitasi, interaksi antara petugas dan peserta, serta kondisi sarana dan prasarana yang menunjang pelaksanaan program. Sementara itu, dokumentasi digunakan sebagai bahan pendukung untuk menelaah pedoman teknis, laporan kegiatan, serta regulasi terkait pelaksanaan rehabilitasi narkoba di lapas. Dalam penelitian kualitatif, peneliti berperan sebagai instrumen utama dengan bantuan pedoman wawancara dan lembar observasi yang disusun secara terstruktur agar proses pengumpulan data berjalan sistematis (Jainah, 2024).

Proses analisis data dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Pada tahap reduksi, data yang terkumpul dikelompokkan dan

dipilih sesuai fokus penelitian yaitu faktor-faktor yang mendukung maupun menghambat jalannya program rehabilitasi narkoba. Selanjutnya, data disusun dan dipaparkan dalam bentuk uraian naratif yang menggambarkan pola, kecenderungan, serta hubungan antar temuan. Tahap akhir berupa penarikan kesimpulan, di mana peneliti merumuskan makna dan implikasi dari data yang telah dianalisis. Untuk memastikan keabsahan temuan, penelitian menerapkan teknik triangulasi sumber dan metode dengan membandingkan informasi hasil wawancara, observasi, dan dokumen resmi. Dengan prosedur tersebut, hasil penelitian diharapkan memiliki validitas yang kuat, reliabilitas tinggi, serta layak dipertanggungjawabkan secara akademik (Maimory, 2025).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Temuan penelitian ini diperoleh melalui analisis data kualitatif yang dihimpun dari wawancara mendalam dengan petugas masyarakat, pengelola Program Rehabilitasi Narkoba, serta Warga Binaan Masyarakat (WBP) yang mengikuti program di Lembaga Masyarakat Kelas IIA Muaro Padang. Pengumpulan data juga dilengkapi dengan observasi lapangan terhadap pelaksanaan kegiatan rehabilitasi dan penelaahan berbagai dokumen, seperti pedoman pelaksanaan, laporan kegiatan, serta regulasi kebijakan yang berkaitan dengan upaya rehabilitasi penyalahguna narkoba di lembaga masyarakat. Seluruh data dianalisis menggunakan prosedur kualitatif yang bertujuan untuk mengungkap berbagai faktor yang mendukung maupun menghambat keberlangsungan program (Maimory, 2025).

Berdasarkan analisis, diketahui bahwa Program Rehabilitasi Narkoba di lapas telah berjalan sebagai bagian dari rangkaian pembinaan bagi WBP yang terlibat kasus penyalahgunaan narkoba. Program tersebut mencakup dua jenis layanan utama, yaitu rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Rehabilitasi medis difokuskan pada pemulihan kondisi fisik serta pemantauan kesehatan peserta program, sedangkan rehabilitasi sosial diarahkan pada perubahan perilaku, penguatan mental, konseling, serta peningkatan kesadaran WBP mengenai dampak negatif narkoba. Meski demikian, efektivitas pelaksanaan program sangat dipengaruhi oleh kondisi internal lembaga maupun faktor-faktor eksternal yang terkait dengan dukungan sumber daya.

Penelitian ini menemukan bahwa keberhasilan program sangat bergantung pada seberapa kuat faktor pendukung dapat dimanfaatkan, sementara faktor penghambat berpotensi memperlemah capaian program. Kedua jenis faktor tersebut saling berinteraksi dan menciptakan dinamika tersendiri dalam implementasi rehabilitasi di dalam lapas. Komitmen petugas, dukungan kebijakan internal, dan semangat sebagian WBP menjadi komponen yang meningkatkan keberjalanan program. Namun secara bersamaan, keterbatasan tenaga terlatih, kurang optimalnya implementasi kebijakan, serta minimnya fasilitas pendukung menjadi hambatan yang masih sering dijumpai (Jainah, 2024).

Untuk memperjelas pola temuan penelitian, berbagai faktor tersebut disederhanakan ke dalam tabel berikut, yang menggambarkan perbandingan antara aspek pendukung dan faktor yang menjadi tantangan dalam pelaksanaan Program Rehabilitasi Narkoba.

Tabel 1. Ringkasan Faktor Pendukung dan Penghambat Pelaksanaan Program Rehabilitasi Narkotika

No	Aspek	Faktor Pendukung	Faktor Penghambat
1	Sumber Daya Manusia	Komitmen dan keterlibatan petugas	Jumlah petugas terlatih masih terbatas
2	Kebijakan	Adanya regulasi internal yang mendukung	Pelaksanaan kebijakan belum sepenuhnya optimal
3	Sarana-Prasarana	Tersedianya ruang kegiatan dasar	Keterbatasan fasilitas rehabilitasi
4	Partisipasi WBP	Motivasi dan keterlibatan sebagian peserta	Kesadaran dan komitmen WBP yang masih bervariasi
5	Kerja Sama	Terjalannya koordinasi dengan instansi lain	Kerja sama belum berlangsung secara berkelanjutan

Secara keseluruhan, temuan menunjukkan bahwa pelaksanaan program rehabilitasi telah berjalan dengan landasan yang kuat, tetapi belum terlepas dari kendala teknis dan struktural. Keberadaan faktor pendukung memberikan ruang bagi program untuk berkembang dan memberikan manfaat bagi WBP, sementara berbagai hambatan menuntut adanya penguatan sumber daya, peningkatan kompetensi petugas, serta perbaikan sistem koordinasi lintas instansi agar tujuan rehabilitasi dapat tercapai secara optimal. Temuan ini sekaligus menegaskan bahwa efektivitas program sangat ditentukan oleh keseimbangan antara kapasitas internal lembaga dan dukungan eksternal yang tersedia.

Pembahasan

Pembahasan ini memperluas hasil penelitian dengan mengaitkannya pada teori serta temuan-temuan empiris yang relevan. Uraian disusun secara naratif agar memberikan gambaran menyeluruh mengenai berbagai faktor yang memengaruhi pelaksanaan Program Rehabilitasi Narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Muaro Padang (Jainah, 2024).

Faktor Pendukung Pelaksanaan Program Rehabilitasi Narkotika

Salah satu temuan utama yang memperkuat keberjalanan Program Rehabilitasi Narkotika adalah tingginya komitmen petugas pemasyarakatan dalam menjalankan tugas pembinaan. Petugas tidak hanya berfungsi sebagai pengawas keamanan, tetapi juga menjadi pendamping yang terlibat langsung dalam proses rehabilitasi WBP. Sikap empati serta pendekatan humanis yang mereka terapkan memberikan suasana yang lebih suportif bagi peserta program, sehingga WBP cenderung lebih terbuka, kooperatif, dan berpartisipasi aktif selama kegiatan berlangsung.

Selain itu, keberadaan kebijakan internal lembaga turut menjadi dasar kuat dalam mendukung implementasi program. Regulasi tersebut memberikan kepastian prosedur dan arah kerja bagi petugas, sehingga aktivitas rehabilitasi dapat berjalan meskipun lembaga dihadapkan pada berbagai keterbatasan operasional. Hidayah (2026) menegaskan bahwa dukungan kebijakan merupakan elemen awal yang menentukan keberlanjutan program, terutama dalam konteks lembaga pemasyarakatan yang memiliki struktur birokrasi ketat.

Hal lain yang menjadi kekuatan pelaksanaan program adalah terjalinnya kerja sama antara lapas dan berbagai instansi eksternal. Bentuk kolaborasi tersebut mencakup pemberian materi pembinaan, pendampingan teknis, serta dukungan tenaga profesional dalam pelaksanaan rehabilitasi. Sinergi lintas lembaga inilah yang memperluas cakupan layanan yang diterima WBP, sehingga pembinaan tidak hanya berfokus pada aspek kesehatan fisik, tetapi juga menyentuh aspek psikososial dan edukatif secara lebih utuh.

Faktor Penghambat Pelaksanaan Program Rehabilitasi Narkotika

Di sisi lain, penelitian ini juga mengidentifikasi sejumlah hambatan yang berpengaruh

terhadap efektivitas program. Kendala utama terletak pada keterbatasan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi khusus dalam rehabilitasi narkoba. Jumlah petugas yang dapat menjalankan fungsi konseling atau pendampingan profesional masih minim. Sejalan dengan temuan Nahamau (2025), kurangnya pelatihan dan pembekalan teknis bagi petugas berdampak pada kurang optimalnya layanan yang diberikan kepada WBP.

Hambatan berikutnya berasal dari kondisi sarana dan prasarana. Fasilitas rehabilitasi yang tersedia belum sepenuhnya mendukung pelaksanaan program secara maksimal. Ruang konseling yang terbatas, sarana pendukung kegiatan yang minim, serta ketersediaan alat atau modul rehabilitasi yang belum memadai memengaruhi intensitas serta kualitas kegiatan pembinaan. Kondisi ini mengharuskan petugas untuk memodifikasi kegiatan rehabilitasi agar dapat disesuaikan dengan fasilitas yang ada.

Selain hambatan kelembagaan, faktor internal WBP juga berperan besar dalam memengaruhi jalannya program. Tidak semua peserta memiliki motivasi atau kesadaran yang sama mengenai pentingnya rehabilitasi. Sebagian mengikuti program sekadar untuk memenuhi persyaratan administratif tanpa komitmen pribadi untuk pulih dari ketergantungan narkoba. Hal ini berdampak pada tingkat keberhasilan rehabilitasi, sebagaimana ditegaskan oleh Nahamau (2025) yang menemukan bahwa rendahnya kesiapan mental peserta dapat menghambat proses pemulihan.

Persepsi WBP terhadap Program Rehabilitasi

Hasil wawancara menunjukkan variasi persepsi di kalangan WBP mengenai program rehabilitasi. Beberapa peserta merasakan manfaat langsung, terutama dalam meningkatkan pengetahuan mengenai bahaya narkoba serta mendorong perubahan pola pikir. Salah satu WBP menyampaikan bahwa rehabilitasi membuka kesadaran baru mengenai dampak narkoba terhadap diri dan keluarganya. Testimoni tersebut menggambarkan adanya proses internalisasi nilai yang positif sebagai dampak program.

Namun, tidak semua WBP memperoleh manfaat secara cepat. Beberapa peserta mengungkapkan bahwa program baru terasa efektif setelah mereka mengikuti kegiatan dalam waktu yang cukup panjang. Hal ini menunjukkan bahwa rehabilitasi merupakan proses berkelanjutan yang memerlukan pendekatan individual sesuai dengan tingkat kesiapan dan kondisi psikologis peserta (Nuristia, 2023).

Implikasi Faktor Pendukung dan Penghambat terhadap Efektivitas Program

Interaksi antara faktor pendukung dan faktor penghambat tersebut memberikan pengaruh langsung terhadap efektivitas Program Rehabilitasi Narkoba. Faktor pendukung seperti komitmen petugas, kebijakan internal, dan kerja sama lintas instansi dapat mempertahankan keberlangsungan program serta mendorong perubahan positif pada WBP. Namun, jika hambatan seperti keterbatasan tenaga terlatih, minimnya fasilitas, dan rendahnya motivasi peserta tidak diatasi, efektivitas program dapat menurun secara signifikan.

Untuk meningkatkan kualitas program, diperlukan strategi yang mampu memperkuat faktor pendukung, seperti peningkatan kapasitas petugas melalui pelatihan, perluasan kerja sama antarlembaga, dan penguatan kebijakan institusional. Upaya mitigasi hambatan juga harus dilakukan, misalnya dengan menambah anggaran, memperbaiki fasilitas rehabilitasi, serta mengembangkan pendekatan pembinaan yang lebih adaptif terhadap kebutuhan WBP. Langkah-langkah tersebut diharapkan dapat meningkatkan keberlanjutan dan efektivitas program rehabilitasi secara keseluruhan (Nuristia, 2023).

KESIMPULAN

Berdasarkan rangkaian temuan dan analisis dalam penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa Program Rehabilitasi Narkoba yang dilaksanakan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Muaro Padang merupakan bagian fundamental dari proses pembinaan bagi Warga Binaan

Pemasyarakatan (WBP) penyalahguna narkoba. Program ini tidak sekadar ditujukan untuk memulihkan kondisi fisik maupun psikologis peserta, tetapi juga diarahkan pada upaya membentuk kembali pola pikir, sikap, serta perilaku mereka agar mampu menjalani kehidupan yang lebih sehat dan produktif setelah selesai menjalani masa pidana.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan program ditopang oleh berbagai faktor yang memiliki pengaruh besar terhadap keberlangsungannya. Di antara faktor pendukung tersebut adalah komitmen petugas pemasyarakatan yang tidak hanya menjalankan tugas pengawasan, tetapi juga terlibat aktif sebagai pembina dan pendamping selama proses rehabilitasi berlangsung. Kebijakan internal lembaga turut memberikan dasar hukum dan arah kerja yang jelas sehingga program dapat dilaksanakan secara konsisten. Kolaborasi dengan berbagai instansi eksternal pun memperkuat pelaksanaan program melalui dukungan profesional, teknis, dan materi pembinaan yang relevan.

Meski demikian, terdapat sejumlah kendala yang mempengaruhi efektivitas program rehabilitasi. Kendala paling menonjol adalah terbatasnya sumber daya manusia yang memiliki kompetensi khusus dalam bidang rehabilitasi penyalahguna narkoba. Jumlah petugas yang terbatas dan minimnya pelatihan teknis berdampak pada pelaksanaan program yang belum mencapai potensi maksimalnya. Selain itu, fasilitas pendukung rehabilitasi yang masih belum memadai menghambat frekuensi dan ragam kegiatan pembinaan yang dapat dilakukan. Tantangan lain datang dari sisi internal WBP, antara lain perbedaan motivasi, kesiapan mengikuti program, serta tingkat ketergantungan narkoba yang bervariasi. Sebagian WBP menunjukkan respon positif setelah mengikuti program, namun sebagian lainnya masih belum merasakan manfaat optimal karena belum memiliki kesadaran penuh mengenai pentingnya rehabilitasi.

Secara menyeluruh, penelitian ini menegaskan bahwa Program Rehabilitasi Narkoba telah memberikan dampak positif bagi sebagian WBP, namun masih membutuhkan penguatan pada berbagai aspek. Interaksi antara faktor pendukung dan penghambat menciptakan dinamika pelaksanaan yang kompleks sehingga diperlukan langkah perbaikan yang terencana agar tujuan rehabilitasi dapat dicapai secara efektif dan berkelanjutan.

Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, beberapa rekomendasi yang dapat dipertimbangkan untuk meningkatkan mutu pelaksanaan Program Rehabilitasi Narkoba di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Muaro Padang adalah sebagai berikut.

Pertama, diperlukan upaya penguatan kapasitas sumber daya manusia, terutama petugas pemasyarakatan yang terlibat langsung dalam program rehabilitasi. Pelatihan khusus terkait rehabilitasi narkoba, teknik konseling, pendekatan psikososial, dan manajemen pembinaan sangat penting dilakukan agar petugas memiliki keterampilan yang memadai untuk mendampingi WBP secara profesional dan efektif.

Kedua, lembaga perlu memprioritaskan pengembangan sarana dan prasarana rehabilitasi. Fasilitas seperti ruang konseling yang nyaman, area pembinaan yang representatif, serta alat pendukung kegiatan rehabilitasi harus ditingkatkan agar proses pembinaan berjalan lebih optimal. Ketersediaan fasilitas yang memadai juga memungkinkan penerapan metode rehabilitasi yang lebih inovatif.

Ketiga, sinergi dan kerja sama dengan instansi terkait perlu terus diperkuat. Bentuk kolaborasi dapat berupa penyediaan tenaga ahli, pendampingan teknis berkelanjutan, serta integrasi program pascarehabilitasi. Kerja sama lintas sektor yang lebih intensif diharapkan dapat memperluas cakupan layanan rehabilitasi sekaligus memperbaiki kualitas pendampingan.

Keempat, peningkatan motivasi dan kesadaran WBP menjadi aspek penting yang perlu diperhatikan. Lapas perlu mengembangkan pendekatan pembinaan yang lebih personal,

persuasif, dan relevan dengan kebutuhan individu. Kegiatan edukatif yang mendorong refleksi diri dapat membantu WBP memahami pentingnya pemulihan sehingga mereka mengikuti program bukan karena kewajiban, melainkan karena kesadaran intrinsik.

Terakhir, peneliti selanjutnya disarankan untuk memperluas cakupan penelitian dengan pendekatan berbeda, seperti penelitian kuantitatif atau *mixed methods*, guna mengukur tingkat keberhasilan program rehabilitasi secara lebih objektif. Studi perbandingan antar-lapas juga dapat memberikan gambaran yang lebih luas tentang praktik rehabilitasi narkoba di Indonesia serta membantu merumuskan kebijakan yang lebih komprehensif di tingkat nasional.

DAFTAR PUSTAKA

- Alfiati, R., & Wahyono, A. (2025). Program rehabilitasi sosial di Lapas Narkoba Kelas IIA Nusakambangan: Sinergi dan pendekatan holistik dalam mendukung pemulihan warga binaan pemasyarakatan. *Jurnal Ilmiah Penelitian Mahasiswa*, 3(6), 97–101.
- Damayanti, P. L. (2025). Peran lembaga rehabilitasi dalam sistem hukum pidana narkoba di Indonesia. *Jurnal Hukum, Politik dan Ilmu Sosial*, 3(4).
- Hidayah, N. A., & Iskandar, I. S. (2026). Implementasi program rehabilitasi sosial pada narapidana perempuan penyalahguna narkoba di lembaga pemasyarakatan perempuan. *ISO: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora*, 6(1).
- Ilmu Pemasyarakatan, & Yuska, S. (2025). Peran rehabilitasi therapeutic community dalam pemulihan narapidana narkoba di Lapas Narkoba Kelas IIA Jakarta. *Innovative: Journal of Social Science Research*, 5(3), 3978–3989.
- Jainah, Z. O., & Anggara, Y. D. (2024). Implementasi rehabilitasi medis dan sosial terhadap narapidana narkoba pada lembaga pemasyarakatan. *Legitimasi: Jurnal Hukum Pidana dan Politik Hukum*, 11(2).
- Maimory, A. A. N., & Sutrisno, H. (2025). Tindak pidana narkoba: Antara rehabilitasi dan pemidanaan dalam perspektif sistem peradilan pidana. *Jurnal Pahlawan*, 8(1).
- Nahamau, R. C., & Iskandar, I. S. (2025). Analisis rehabilitasi sosial bagi narapidana kasus narkoba di Lapas Narkoba Kelas IIA Jakarta dan Lapas Kelas I Tangerang. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial dan Hukum*, 3(4).
- Nuristia, M., & Azwar, M. (2023). Kebutuhan informasi narapidana narkoba dalam proses rehabilitasi sosial di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Tangerang. *Pustakaloka*, 15(1), 1–28.
- Ramdlonaning, A., & Zulfa, E. A. (2025). Analisis kebijakan rehabilitasi bagi penyalahguna narkoba di Indonesia. *Ius Constituendum: Jurnal Hukum dan Ketatanegaraan*, 8(1).
- Saraya, S., & Handayani, Y. (2025). Rehabilitasi penyalahguna narkoba dengan double track system dalam pemidanaan di Indonesia. *ADIL Indonesia Journal*, 4(2).